

BAB. II

GAMBARAN UMUM POLITIK LUAR NEGERI

AMERIKA SERIKAT.

Pemerintahan di dunia ini selalu memutuskan kebijakan luar negeri dengan tidak mengabaikan pemerintahan - pemerintahan sebelumnya dari negara itu sendiri, begitu juga dengan pemerintah Amerika Serikat. Dengan berdasarkan pada keinginan untuk menciptakan kebebasan dalam hubungan internasional, Amerika dengan kekuatannya sebagai sebuah negara yang dikenal adidaya ingin menciptakan suatu tatanan internasional yang aman dan damai. Akan tetapi, seiring dengan keadaan dunia internasional dan juga domestik yang berubah - ubah dan terus berkembang, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga sering berubah - ubah sama seperti kebijakan - kebijakan luar negeri negara - negara lain pada umumnya dan bahkan Amerika juga sering melanggar dasar - dasar politik luar negerinya untuk mempertahankan kepentingan nasional negaranya.

Amerika sebagai salah satu anggota masyarakat internasional juga melakukan berbagai macam hubungan dan interaksi dengan berbagai negara di dunia. Dalam menjalankan berbagai hubungan dengan negara - negara tersebut, Amerika menggunakan politik luar negerinya untuk mempengaruhi sikap dari negara lain serta untuk menyesuaikan kegiatan - kegiatannya dengan lingkungan internasional yang pada akhirnya digunakan untuk mencapai dan menjaga

kepentingan nasionalnya.⁹ Amerika Serikat mempunyai karakteristik politik negeri seperti yang digambarkan di bawah ini.

A. Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Sejak berdirinya negara Amerika Serikat pada tahun 1796, pemerintah Amerika selalu mempertimbangkan aspek demokrasi dan penegakkan HAM serta melihat juga kedalam isu - isu lingkungan internasional dan tatanan dunia internasional sebagai landasan bagi sikap dan tindakannya dalam melakukan berbagai hubungan dengan negara – negara lain di dunia. Dan hal tersebut menjadikan politik luar negeri Amerika Serikat memiliki berbagai karakteristik yang seiring dengan berjalan waktu dan pergantian pemerintahan terus berubah – ubah seperti berikut :

1. Isolasionis.¹⁰

Isolasionis adalah doktrin yang menuntut sebuah negara agar membatasi hubungannya dengan negara lain, khususnya hubungan politik hingga ke taraf yang paling umum.¹¹ Pada tahun 1976 hingga awal abad ke 20, Amerika Serikat menerapkan politik luar negeri yang bersifat isolasionis. Hal ini terlihat dari orientasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada saat itu, dimana kebijakan Amerika Serikat hanya terbatas pada keinginan Amerika Serikat untuk menghindarkan diri dari keterlibatan langsung yang akan membawa Amerika ke dalam persekutuan

⁹. Harwanto Dahlan, *Politik Pemerintahan Amerika*, Diktat Kuliah UMY, 1993, hal 78

¹⁰. Bambang Cipto, *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingkaran, Yogyakarta.2003 hal. 195

¹¹. Michael A. Biff, *Karya Ideologi Politik Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), hal 103

aliansi militer negara Eropa. Seperti yang ada dalam Doktrin presiden Monroe yang menyatakan bahwa dengan mengisolir diri maka Amerika akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan oleh peperangan seperti halnya yang terjadi di Eropa.¹²

Kebijakan luar negeri yang isolasionis ini mengakibatkan pada masa sebelum Perang Dunia I Amerika Serikat tidak terlibat di dalam percaturan dunia. Prinsip isolasi ini sangat mendominasi politik luar negeri Amerika saat itu sampai pada menjelang Perang Dunia I, dimana keterlibatan Amerika dalam politik internasional semakin meningkat yang pada akhirnya dikarenakan tradisi isolasionis yang sangat kuat tertanam dalam diri para pengambil keputusan Amerika Serikat, maka keterlibatan Amerika saat itu hanya berlangsung sementara dengan penarikan diri Amerika dari kancah politik internasional segera setelah Perang Dunia I selesai.¹³

2. Netralitas.

Karakteristik kebijakan luar negeri yang isolasionis diikuti dengan karakteristik politik luar negeri Amerika Serikat yang netral. Politik netral merupakan status dimana suatu negara tidak mengambil bagian dalam suatu perang serta menempatkan hak dan kewajiban tertentu yang ditujukan pada negara yang berperang, mewarnai politik luar negeri

¹². Bambang Ginto, Politik dan Pemerintahan Amerika, Lingkeran, Yogyakarta 2003 hal. 196

Amerika Serikat dalam menghadapi gejolak perang Eropa yang berkecamuk waktu itu.¹⁴

Sikap netral Amerika dilatarbelakangi oleh pidato George Washington yang menyatakan bahwa, “Amerika Serikat akan tetap bersikap netral dalam konflik di Eropa”. Kebijakan sikap netral masih dipertahankan di masa pemerintahan Monroe yang menetapkan bahwa “Garis kebijakan kita yang pertama dan utama adalah, bahwa kita tidak akan pernah melibatkan diri dalam kancah pertikaian di Eropa, tidak memperbolehkan Eropa mencampuri masalah Antlatik Amerika Utara dan Selatan, mempunyai seperangkat kepentingan yang berbeda dengan kepentingan Eropa serta mempunyai ciri sendiri”. Meskipun Amerika tetap dengan politik isolasionisnya dan bersikap netral tetapi di abad ke 19, Amerika Serikat meluaskan wilayahnya dan bahkan pada saat perang dunia I, Amerika Serikat menjual senjata kepada negara – negara sekutu dan memberikan kredit sekitar 10 juta Dollar kepada Perancis. Tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan karakteristik Amerika saat itu dan bahkan dianggap sikap tidak netral oleh Jerman.

3. Ekspansionis.

Kebijakan ekspansionis Amerika dilandasi atas dasar tanggung jawab moral bangsa untuk memelihara dan menciptakan kebebasan guna tercapainya perdamaian dunia yang didasarkan nilai – nilai demokratis yang sangat diagung – agungkan. Kemauan untuk melakukan ekspansionis

¹⁴. Hans J. Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985, hal 55-56

didukung oleh keberhasilan dari dalam negeri Amerika yang mampu membangun kekuatan politik dan ekonomi yang paling dinamis sedunia serta diikuti dengan penyebaran berbagai gagasan reformasi internasional.¹⁵ Namun gagasan ini kemudian berkembang menjadi imperialis.

Sifat ekspansionis ini ditunjukkan dengan cara merebut Puerto Rico dengan cara peperangan, menganeksasi kepulauan Hawaii dalam rangka menduduki Filipina melalui perang Spanyol yang diikuti dengan mengklaim Guam dan Samoa dan hal ini dilakukan oleh Amerika dalam masa – masa peralihannya untuk meninjau kembali kebijakan isolasionis mereka.

4. Intervensionis.

Dengan masuknya keterlibatan Amerika dalam isu – isu Internasional dapat menjadi tanda bahwa ada terjadi pergeseran dalam politik luar negeri negaranya. Pergeseran peran Amerika itu didasarkan bahwa Eropa yang dapat dikatakan sebagai pusat politik dunia saat itu telah gagal menjaga kestabilan dan keamanan dunia, sehingga Amerika yang menginginkan dunia yang damai merasa perlu untuk turun tangan membantu menyelamatkan dunia internasional saat itu.

Prinsip ini dimulai dari persepsi Amerika mengenai dunia yang bertumpu pada masalah kebebasan politik dan kebebasan dari rezim yang mengusung kediktatoran. Hingga politik luar negeri ini pada umumnya

¹⁵ Harry A. Doherty, *Politik Pemerintahan Amerika*, Diklat Kuliah UMY, 1992, hal 83

ditujukan untuk mencegah pengaruh ideologi lain yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip – prinsip kebebasan atau demokrasi, dimana untuk mencapai keinginannya tersebut Amerika Serikat tidak segan – segan untuk melakukan intervensi dengan mengatasnamakan demokrasi.¹⁶ Hal seperti itupun sampai saat ini sering dilakukan oleh Amerika terhadap negara – negara yang dianggap mempunyai rezim diktator.

Kebijakan intervensi lebih terlihat lagi setelah perang dunia II. Amerika menganggap intervensi ini ditujukan untuk mencegah pengaruh ideologi lain yang menurutnya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Alasan diatas yang menyebabkan Amerika tidak lagi segan – segan melakukan intervensi ke negara lainnya dengan dalih untuk menegakkan prinsip demokrasi. Hal ini jugalah yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan antisipasi terhadap ekspansionis komunis Uni Soviet dengan menerapkan politik pembendungannya atau juga disebut *Containment Policy*, politik ini dikenalkan oleh Harry S. Trumann sehingga dikenal juga dengan *Doktrin Trumann*¹⁷. Politik ini pada intinya dilakukan untuk mempertahankan tatanan kebebasan dan integritas melawan gerakan – gerakan yang dapat menyebabkan adanya rezim yang totaliter.

5. Ambiguous.

Dikatakan mempunyai karakteristik ambiguous ini dikarenakan sikap Amerika yang tidak konsisten dengan sikap politik luar negerinya di awal perkembangannya. Sikap tersebut banyak terjadi pada pasca perang

¹⁶ Harwanto Dahlan, *Politik Pemerintahan Amerika*, Diktat Kuliah UMY, 1993, hal 78

¹⁷ D. ... *Politik dan Pemerintahan Amerika*, Lingsar, Yogyakarta 2002, hal. 108

dunia II atau masa perang dingin hingga saat ini. Sebagai sebuah negara yang dikatakan mempunyai demokrasi terkuat menyebabkan Amerika berkewajiban untuk menjadi penanggung jawab dalam aktivitas politik dunia agar berjalan dengan baik.¹⁸ Hal ini terjadi karena pandangan Amerika yang memandang Eropa telah gagal menjaga ketertiban dunia. Amerika merasa telah menyelamatkan Eropa dari terjadinya peperangan dan kehancuran hingga perang dunia II. Dengan demikian, stabilitas dunia dan keamanan Amerika nantinya akan terpenuhi dengan baik melalui keterlibatan dan bukan melalui politiknya yang isolasionis.

Dengan sikapnya yang seperti ini, Amerika sering mengesampingkan nilai – nilai demokratis yang telah diagung – agungkan sejak abad 19 dalam keterlibatannya di dunia internasional untuk menyelesaikan konflik di Asia, Afrika, Amerika Latin dan Timur Tengah dan juga yang utama untuk memerangi komunis serta membendung penyebarannya di negara – negara yang dilihat Amerika dapat membantu kepentingan nasionalnya. Demikian juga ketika Amerika bahkan tetap mendukung negara – negara yang dipimpin oleh seorang diktator. Berakhirnya perang dingin tidak secara cepat melunturkan sikap Amerika tersebut dan bahkan semakin membesar terutama jika terdapat banyak kepentingan nasionalnya di negara tersebut.

¹⁸. Howard Dehler, *Politik Pemerintahan Amerika*, Diklat Keliah UMY, 1992, hal 84

B. Prinsip-Prinsip Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Prinsip – prinsip politik luar negeri Amerika Serikat selama ini bersumber dari pengalaman masa kolonial pada abad 17 serta nilai - nilai tradisi yang telah ada di Amerika sejak. Adapun prinsip – prinsip politik luar negeri Amerika Serikat tersebut adalah :

1. Anti Imperialisme serta anti komunis.

Pada dasarnya Amerika memiliki tradisi politik luar negeri yang anti kolonial dan anti kolonialisme, dimana hal ini dipengaruhi oleh sejarah berdirinya Amerika yang lahir dari perlawanannya terhadap kolonialisme dan imperialisme Inggris. Dan hal tersebutlah yang mendorong Amerika Serikat membantu negara – negara untuk melawan kolonialisme dan invansi dari negara – negara lain.¹⁹ Dimana tradisi tersebut menjadi salah satu prinsip yang menjadi dasar utama Amerika dalam setiap perumusan politik luar negerinya.

Berdasarkan dari prinsip ini pula, Amerika menerapkan politik pembendungan atau *Containment Policy* terhadap komunisme Uni Soviet yang saat itu mulai disebarakan di Eropa, Asia dan Timur Tengah yang secara geografis berdekatan atau sedikit berada di luar batas wilayah yang mana hal tersebut dipandang Amerika sebagai bentuk tindakan invansi. Akan tetapi seiring dengan pola atau peta politik yang berubah – ubah, Amerika sering melanggar sendiri

¹⁹ Hanvanto Dahlan, *Politik Pemerintahan Amerika*, Diklat Kuliah UMY, 1993, hal 78

prinsipnya ini. Dimana Amerika sering melakukan imprealisme dan invansi ke negara – negara lain.

2. Menjunjung tinggi nilai – nilai demokrasi dan HAM.

Demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang selalu diagung – agungkan oleh Amerika dan menjadi inti dari kebudayaan politik negara tersebut. Amerika menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menciptakan suatu sistem politik pemerintahan demokrasi yang didasarkan pada cabang pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan juga disertai sistem pengawasan berimbang atau sistem “*Check and Balance*”.²⁰ Hal tersebut dilakukan oleh Amerika untuk memperkecil peluang munculnya kekuasaan otoriter dalam pemerintahan negara tersebut.

Amerika mengharapkan prinsip atau sistem demokrasi yang dicanangkan olehnya ini dapat diterapkan dalam pemerintahan di setiap negara, untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan cara liberalis. Hal ini jugalah yang menyebabkan Amerika terlibat untuk memerangi Komunisme Uni Soviet dan negara – negara lain yang saat itu telah mengadopsi sistem komunis agar sistem yang dibawa oleh uni Soviet tersebut tidak menyebar ke negara – negara lain. Dan pada akhirnya Amerika melibatkan diri atau terlibat dalam beberapa perang dan mengintervensi negara lain dalam membentuk pemerintahan yang sesuai dengan harapannya di banyak negara atau kawasan.

²⁰. D. ... Ginta, Politik dan Pemerintahan Amerika, Liankeran, Yogyakarta 2003 hal. 11

Prinsip – prinsip ini lebih gencar lagi disebarkan oleh Amerika Serikat setelah berakhirnya perang dingin yang menyebabkan politik luar negeri Amerika lebih banyak diwarnai oleh nilai – nilai demokrasi yang meliputi hak asasi manusia, kebebasan politik yang nantinya akan berakhir dengan dikaitkannya hal tersebut pada masalah – masalah ekonomi, politik dan keamanan, baik itu secara bilateral maupun multilateral.

C. Tujuan Dasar Dan Sarana Pencapaian Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Amerika sebagai negara adidaya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam tatanan politik internasional. Dalam perannya yang besar di dunia internasional ini Amerika didukung oleh sumber daya alam yang kurang memadai. Oleh karena itu Amerika selalu berusaha untuk memutuskan sebuah kebijakan luar negeri yang pada akhirnya akan mendukung dan memberikan keuntungan untuk kepentingan nasional negaranya.

1. Tujuan Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Selama ini Amerika Serikat memiliki beberapa tujuan politik luar negeri yang berjalan beriringan dengan prinsip – prinsip politik luar negerinya.²¹ Pada dasarnya tujuan dasar kebijakan luar negeri Amerika Serikat dari waktu ke waktu memiliki kesamaan, akan tetapi untuk

²¹ Haruanto Deblan, *Politik Internasional Amerika*, Diklat Kuliah ILM, 1992, hal.78

prioritas kebijakan luar negeri tersebut berbeda – beda dari satu periode ke periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik internasional. Secara umum tujuan dasar politik Amerika adalah sebagai berikut :

a. *National Security* (Keamanan Nasional).

Keamanan nasional merupakan tujuan dasar sebuah negara yang sangat penting, khususnya untuk melindungi kedaulatannya dari berbagai gangguan baik intern maupun ekstern. Demi menjaga keamanan nasionalnya maka sebuah negara melengkapi dirinya dengan berbagai cara seperti misalnya dengan persenjataan yang lengkap dan canggih untuk menciptakan suatu pencitraan sebagai negara yang mempunyai kekuatan. Saat ini ancaman – ancaman bagi sebuah negara tidak hanya berbentuk ancaman fisik tetapi juga ancaman dari ideologi – ideologi yang ada.

Beberapa tahun ini, Amerika gencar melakukan berbagai intervensi di negara – negara yang dianggap strategis untuk mendukung kepentingan nasionalnya atau di negara – negara yang dianggap dapat membahayakan keamanan nasional negaranya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Amerika yang melakukan berbagai invansi di negara – negara yang dianggap sebagai sarang teroris, dimana hal tersebut disebabkan oleh penyerangan gedung penting negaranya oleh sekelompok terorisme pada 11 September 2001 yang lalu. Bencana atau dapat dikatakan serangan tersebut adalah

ancaman yang sangat besar untuk yang kedua kalinya bagi tempat-tempat penting Amerika setelah pada tahun 1945 pangkalan militer Amerika Pearl Harbour diserang oleh Jepang. Adanya serangan dan ancaman dari teroris, Amerika memperketat penjagaan bagi integritas teritorialnya yang bahkan demi keamanan negaranya Amerika tidak mengikuti prinsip – prinsip politik negaranya dan juga kurang memperhatikan kedaulatan negara bangsa lainnya.

b. *World Peace* (Perdamaian Dunia).

Tujuan jangka panjang dari Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya adalah ikut berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dunia, hal ini dipengaruhi oleh adanya pemikiran masyarakat Amerika yang cinta damai. Oleh karena Amerika berusaha untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan berbagai cara baik itu dengan cara kerjasama unilateral maupun dengan membentuk aliansi dengan negara – negara lainnya. Amerika juga membantu untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui bantuan – bantuannya kepada negara – negara berkembang yang sedang mengalami konflik atau perang serta memberikan bantuan kepada negara – negara yang terkena bencana, walaupun banyak pengamat mengatakan bahwa bantuan – bantuan tersebut adalah salah satu cara Amerika Serikat untuk menyebarkan pengaruhnya di negara – negara penerima bantuan tersebut

c. *Self Government* (Pemerintahan Sendiri).

Dalam hal ini Amerika sangat mendukung hak kedaulatan negara bangsa, dimana kedaulatan suatu negara bangsa berhak untuk menentukan sendiri arah dan tujuannya tanpa ada suatu intervensi dari negara – negara lainnya. Melalui sistem demokrasinya, Amerika mendukung dan menghargai kedaulatan berbagai negara. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Amerika sering mengabaikan kebijakan luar negerinya ini dan mulai menyerang kedaulatan negara – negara yang dirasa potensial untuk mendukung kepentingan nasional negaranya. Akan tetapi demokrasi saat ini dijadikan sebagai sebuah alasan oleh Amerikat Serikat untuk melakukan berbagai tindakan politik luar negeri, dari hanya kecaman diplomatik sampai pada tindakan – tindakan militer yang tidak menghargai kedaulatan negara lain dengan alasan – alasan penegakan demokrasi atau untuk menyebarkan sistem demokrasi yang dianut.²²

d. *Free and Open Trade* (Perdagangan Bebas).

Perdagangan adalah salah satu cara berbagai negara untuk tetap menghidupkan perekonomian dalam negerinya. Dalam kenyataannya Amerika Serikat sangat memerlukan pasar luar negeri untuk memasarkan komoditas – komoditas unggulan untuk

²² Sidik Istmika, AS Penchambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda AS, BRIGRAF

menambah pendapatan negaranya. Hal tersebut kemudian menyebabkan Amerika Serikat memberikan dukungannya terhadap segala usaha untuk mempertahankan dan memberlakukan suatu sistem perdagangan yang bebas dan terbuka dengan negara – negara lain. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat adalah penganut Liberalisme dan dalam perspektif liberal menempatkan individu sebagai fokus utama dalam ekonomi agar dapat meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan dan membiarkan pertukaran antar individu dalam ekonomi domestik dan internasional dijalankan secara bebas dan tidak dibatasi seperti yang dianjurkan oleh ajaran liberalisme.²³

e. *Concern of Humanity* (Kepedulian Terhadap Kemanusiaan).

Dalam dunia internasional, Amerika dikenal sebagai negara adidaya yang kuat oleh karena itu Amerika Serikat merasa tidak bisa mengabaikan keadaan atau kondisi dari negara – negara tetangganya. Amerika menjadikan aspek masalah – masalah kemanusiaan sebagai salah satu tujuan dasar politik luar negerinya. Hal – hal tersebut yang kemudian diwujudkan dalam bentuk bantuan – bantuan yang diberikan terhadap masalah – masalah kemanusiaan dan bencana alam seperti gempa bumi, tsunami hingga bantuan bagi negara – negara miskin yang dilanda

²³. Free Trade dalam Perspektif Liberalis, <http://abimpribumi.blogspot.com/2011/01/free-trade-dalam-perspektif-liberalis-13.html>, diakses pada tanggal 6 Februari 2012

kelaparan. Bantuan kemanusiaan tersebut tidak hanya terbatas pada hal – hal bencana alam dan keadaan ekonomi tetapi Amerika juga membantu negara – negara yang dilanda konflik atau peperangan yang dalam hal ini dapat dilakukan Amerika dengan bantuan langsung maupun tidak langsung melalui lembaga – lembaga tertentu. Dalam setiap bantuan yang diberikan Amerika bagi negara – negara yang dibantu, Amerika tidak hanya sekedar membantu dengan alasan niatan baik sebagai sebuah negara besar tetapi juga adanya kepentingan – kepentingan nasional yang dikejar oleh Amerika untuk diraih di negara yang dibantu.

2. Sarana – Sarana Pencapaian Tujuan Politik Luar Negeri Amerika Serikat.

Demi mencapai tujuan politik luar negerinya, Amerika Serikat menggunakan berbagai macam sarana yang potensial untuk membantunya mencapai tujuan politik luar negerinya. Adapun sarana – sarana tersebut adalah sebagai berikut²⁴ :

a. Aliansi dan Pakta.

Aliansi pertahanan timbal balik terbentuk ketika beberapa negara merasa mendapat ancaman yang sama terhadap keamanan negaranya. Aliansi dan Pakta pertahanan banyak dibentuk selama perang dunia dan perang dingin berlangsung. AS telah melibatkan diri

²⁴. Richard C Remy, Lary Elowitz dan William Berlitz, *Government In The United States*, (New York : Mac Milan Publishing Company, 1984) p. 323-331.

dengan hampir 49 negara di dunia. Negara – negara yang tergabung dalam aliansi banyak menggantungkan diri pada dukungan militer Amerika untuk mewujudkan *collective security* terhadap ancaman atau serangan yang mengancam salah satu diantara mereka.

Perang Dunia II telah menyebabkan Amerika membentuk beberapa Aliansi pertahanan dengan berbagai negara dan berbagai kawasan, seperti NATO (*North Atlantic Trade Organization*) yang dibentuk pada bulan April 1949, dan yang di kawasan Asia Tenggara, Amerika membentuk SEATO (*South East Asian Treaty Organization*). Amerika tidak hanya membentuk aliansi pertahanan saja tetapi juga melakukan bilateral treaty seperti yang dilakukan Amerika dengan Jepang pada tahun 1951 dan dengan Korea Selatan yang dibentuk pada tahun 1953. Amerika masih banyak terlibat dalam aliansi – aliansi lain dan bilateral treaty yang lain dengan berbagai negara.

b. Program Bantuan.

Selain melalui aliansi dan pakta – pakta yang dibuat, Amerika juga memberikan berbagai bantuan baik itu berupa bantuan ekonomi, militer maupun bantuan kemanusiaan. Bantuan – bantuan tersebut diberikan kepada banyak negara – negara yang membutuhkan khususnya diberikan untuk negara – negara berkembang dan negara – negara yang dijadikan sebagai target politik Amerika demi memenuhi kepentingan nasional negaranya.

Dengan berakhirnya perang dunia II, Amerika memberikan bantuan kepada negara lain untuk membuat atau membentuk ikatan persahabatan dengan negara – negara yang perekonomiannya hancur akibat perang yang terjadi. Amerika merasa dengan adanya program bantuan yang diberikan maka akan menjadi negara – negara penerima bantuan tersebut akan bergantung pada kekuatan Amerika dan dengan begitu negara – negara tersebut nantinya akan turut menjaga kepentingan Amerika di dunia internasional. Selain itu, dengan adanya bantuan – bantuan tersebut dan terbentuknya suatu hubungan antar Amerika dan negara yang diberikan bantuan, Amerika berusaha untuk membendung pengaruh komunis di negara – negara yang sedang berkembang yang mana pada umumnya adalah negara – negara miskin dan baru yang akan sangat mudah dipengaruhi oleh ideologi – ideologi yang ada, dalam hal ini Komunis yang ditakutkan oleh Amerika.

c. Penggunaan Sanksi Ekonomi.

Sanksi ekonomi merupakan salah satu kebijakan Amerika Serikat yang ditakuti oleh negara – negara kecil. Sanksi ekonomi ini digunakan oleh Amerika ketika menghadapi negara – negara yang menentang dan tidak berkompromi dengan kebijakan luar negeri Amerika. Sanksi – sanksi tersebut dapat berupa tindakan menunda bantuan ekonomi, pinjaman atau bahkan bantuan militer. Sanksi ekonomi biasanya berupa pemotongan akses suatu negara terhadap

bantuan Amerika sehingga dapat menyebabkan roda perekonomian negara tersebut akan terhenti atau terhambat dan pada akhirnya pemerintahan negara tersebut dapat dengan mudah disetir atau diruntuhkan oleh Amerika. Selain itu sanksi ekonomi tersebut juga dapat berupa pembekuan hubungan dagang dengan negara lain atau yang sering juga disebut dengan embargo ekonomi.

d. Penggunaan Kekuatan Militer.

Kekuatan Militer Amerika tidak diragukan lagi oleh banyak negara – negara didunia, dengan kekuatan Militernya yang sangat besar baik dalam jumlah pasukan maupun persenjataan yang sangat mutakhir. Dengan kemampuannya tersebut Amerika dapat melaksanakan kebijakan luar negerinya dengan sangat baik. Namun penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya sering menimbulkan pro dan kontra baik antara kalangan para pembuat keputusan maupun dengan masyarakat Amerika sendiri. Hal ini disebabkan oleh pemikiran rakyat negaranya sendiri yang merasa penggunaan kekuatan militer dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri untuk mendapatkan kepentingan nasional negaranya bukanlah sarana yang baik. Karena terkadang dengan menggunakan kekuatan militer dapat menyebabkan banyak warga – warga sipil yang tidak bersalah dari negara yang menjadi target dari serangan militer yang

e. PBB Sebagai Kekuatan Penjaga Kedamaian.

Amerika adalah salah satu sponsor dari lembaga ini yang dulunya dikenal dengan nama LBB. Lembaga ini bertujuan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai konflik - konflik internasional maupun lokal dengan cara damai, sebagai sarana untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia dan mendorong negara – negara di dunia untuk berkerjasama dengan negara lain. Pada dasarnya PBB dirasa tidak memiliki kekuatan penuh untuk mengatur dunia internasional menjadi negara yang damai dan aman. PBB adalah salah satu lembaga internasional yang hampir sepenuhnya disponsori oleh Amerika Serikat. Hal tersebut menjadikan keputusan – keputusan yang diambil PBB lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan Amerika, sehingga dengan begitu Amerika akan sangat mudah dapat menjalankan kebijakan politik luar negerinya dengan alasan mendapat dukungan dari lembaga internasional yaitu PBB.

D. Arti Penting Wilayah Sudan Bagi Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional Amerika Serikat.

Mayoritas perpecahan internal seringkali dapat ditemukan di berbagai Negara saat ini dan khususnya di Afrika. Bahkan perpecahan internal ini tidak hanya sebatas masuk kepada tingkatan konflik, akan tetapi juga pada terjadinya perang sipil/saudara yang bahkan menyebabkan perpecahan pada kesatuan rakyat sebuah negara. Banyaknya negara – negara kecil yang lemah tetapi memiliki sumber daya alam yang melimpah sering menjadi alasan – alasan bagi negara –

negara besar yang kuat tetapi kekurangan dalam hal sumber daya alam untuk menancapkan pengaruhnya di negara – negara tersebut.

Pilihan Amerika untuk mendukung dan bahkan mengupayakan wilayah selatan negara Sudan untuk menjadi suatu negara yang berbeda tidak terlepas dari berbagai kepentingan nasional Amerika Serikat yang sejak dulu ingin menguasai negara – negara dengan sumber daya alam besar dan juga mengingat negara Sudan adalah negara Islam terbesar di wilayah benua Afrika. Essam Zeidan yang adalah seorang pengamat masalah Timur Tengah menyatakan bahwa :

“Negara Sudan sebagai salah satu negara Arab yang memiliki wilayah paling luas menjadi prioritas utama strategi politik luar negeri Amerika Serikat di wilayah Afrika. Prioritas ini bukan semata-mata karena luas wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki Sudan, namun masih terdapat sebab lain, yaitu Sudan adalah titik temu dan transit budaya Islam ke wilayah Afrika.”²⁵

Negara Sudan sendiri sangat strategis bagi dunia Islam karena termasuk negara terbesar dari sisi luas wilayah. Namun posisi penting Sudan tidak hanya terbatas pada luas wilayahnya, tapi Sudan merupakan lingkaran penyampai budaya dan peradaban Islam ke seluruh Afrika. Hal ini dapat dilihat dari negara-negara tetangga yang berbatasan dengan Sudan seperti Mesir dan Libya yang Islam serta negara-negara Afrika seperti Ethiopia, Uganda, Zaire, Afrika Tengah dan Chad. Keragaman negara-negara tetangga Sudan membuat negara ini menjadi titik pertemuan budaya Islam dengan Afrika Selatan yang masih terus mencari identitas, peradaban dan agama.

25. Sudan Pasca Referendum, http://indonesian.irib.ir/sosialita/-/asset_publisher/OaB7/content/id/1990554?_wp2_101_INSTANCE_OaB7_viewMode=print

Mencermati posisi strategis Sudan, negara ini tentu saja menjadi target konspirasi Amerika yang pada awalnya ingin membendung komunis, akan tetapi musuh Amerika saat ini bukan hanya komunis tetapi juga Islam oleh karena itu Amerika juga menjadikan wilayah Sudan sebagai target politiknya dengan tujuan membendung penyebaran Islam yang saat ini sering dilakukan oleh negara – negara barat dengan memutuskan hubungan antara utara negara Arab dan masyarakat atau peradaban Islam yang berada di benua Afrika dengan wilayah bagian selatan dari benua Afrika yang saat ini dapat dikatakan masih mencari-cari identitas masyarakatnya. Untuk itu, fokus Amerika di wilayah ini adalah upaya memisahkan utara dan selatan dengan membentuk negara Kristen di wilayah bagian selatan negara Sudan. Pembentukan negara ini yang nanti dengan sendirinya diharapkan oleh Amerika dapat mencegah peran Arab dan Islam Sudan untuk memasuki benua Afrika melewati negara ini.

Sejak tahun 1989 yang bersamaan dengan kepemimpinan Omar al-Bashir di Sudan, Amerika Serikat mengambil kebijakan radikal terhadap negara ini. Kebijakan radikal Washington bermula dari pernyataan Omar al-Bashir yang menjadikan Islam sebagai sumber hukum dan undang-undang di negara ini. Dalam dua dekade terakhir ini, Amerika Serikat menerapkan berbagai sanksi politik dan juga sanksi ekonomi terhadap Sudan melalui lembaga-lembaga internasional termasuk Mahkamah Kriminal Internasional (ICC). Gedung Putih berulang kali menghendaki Sudan untuk mematuhi keinginan Amerika Serikat. Jika tidak mengikuti kehendak Washington, Sudan terancam perpecahan yang tentunya diinginkan oleh Amerika dan selanjutnya selanjutnya. Di tengah kondisi

seperti ini, Amerika Serikat memanfaatkan kelompok milisi Sudan Selatan untuk menekan pemerintah di Khartoum. Tak diragukan lagi, sumber kekayaan alam Sudan mengundang perhatian khusus Amerika Serikat dan negara – negara barat lain atas negara ini. Dari Saat Sudan mulai mengeksplorasi dan mengeksport minyak, Amerika Serikat meneruskan keinginannya untuk menjadi negara yang kaya dengan mengeruk kekayaan negara ini. Karena inilah, Amerika Serikat berkonspirasi dengan negara – negara lain untuk mengganggu pemerintahan Omar al-Bashir yang mana adalah salah satu Presiden Sudan yang berani menyebut agama Islam sebagai sumber hukum dan undang-undang. Lebih dari itu, al-Bashir juga menunjukkan sikap tegas atas segala arogansi di dunia dengan mendukung gerakan teroris internasional yang tentunya mengancam hegemoni dan keamanan Amerika Serikat dan juga Amerika melakukan berbagai intervensinya untuk mendapatkan kepentingan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh Amerika untuk membangkitkan perindustrian dan kesejahteraan negaranya.

Sudan mempunyai posisi strategis dalam politik luar negeri Amerika, dimana wilayah ini diketahui memiliki sumber daya alam yang bagus khususnya sumber minyak yang sangat penting untuk Amerika. Menurut data yang ada, banyak sumber minyak di kawasan selatan Sudan. Bahkan disebutkan bahwa 80 persen cadangan minyak Sudan berada di wilayah selatan negara ini. Sudan Selatan mempunyai luas 700 ribu kilometer persegi. Sudan disebut-sebut sebagai negara kaya minyak kedua di Afrika setelah Nigeria dan Angola²⁶. Selain itu,

26. Motif Hubungan Diplomatik Israel-Sudan Selatan, <http://indonesian.tribe.ir/fokus/>

Sudan yang juga berdampingan dengan Sungai Nil tentunya menjadi incara Israel, negara yang dikatakan sebagai anak emas Amerika Serikat ini sejak dulu menginginkan Israel Raya hingga Eufkrat dan Amerika Serikat tentunya ingin mengembangkan ekspansinya ke wilayah Afrika. Dengan cara itu Amerika Serikat ingin bercokol di negara-negara yang berdekatan dengan perairan internasional Laut Merah. Setelah itu, Amerika Serikat bisa mengawasi perairan internasional ini dan memperkokoh posisi Gedung Putih di Tanduk dan Utara Afrika. Pada saat yang sama, Amerika Serikat juga mengincar minyak dan tambang uranium di Sudan. Faktor-faktor inilah yang membuat Amerika Serikat dan sekutu - sekutunya berkerjasama untuk menyebarkan pengaruhnya di Afrika, khususnya Sudan.

Dapat dikatakan kepentingan Amerika di wilayah dalam mengupayakan terciptanya negara Sudan Selatan ini meliputi kepentingan Amerika sebagai salah satu negara yang menganggap Islam dapat mengganggu stabilitas negara super power tersebut dalam hal pengaruh. Dukungan Amerika atas pemisahan selatan Sudan untuk mencegah penyebaran peradaban Arab dan Islam di benua Afrika dan berusaha menahan kehadiran peradaban Islam ini di selatan gurun Afrika. Dengan demikian ke depannya keturunan Arab dan Afrika dapat diadu domba dan terlibat konflik sektarian berkepanjangan. Sekalipun Amerika selama ini senantiasa mencitrakan dirinya sebagai negara sekuler dan percaya akan pemisahan agama dari urusan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang politik, tapi pada kenyataannya agama tetap menjadi kekuatan utama penggerak politik

Berat dan Amerika, khususnya dalam menghadapi dunia Islam. Dari sini, satu lagi

dari tujuan Amerika mendukung pemisahan selatan Sudan dari pemerintah pusat adalah menentangnya atas kehadiran Islam di benua Afrika dan mengubah selatan benua ini tetap menjadi kawasan Kristen. Selain itu dengan perekonomiannya yang semakin memburuk dan banyaknya negara – negara yang dapat menjadi saingannya dalam hal pengaruh di dunia internasional maka Amerika sangat mengupayakan dan mendukung pemisahan selatan Sudan dari pemerintah pusat yang berada di utara. Kawasan ini memiliki cadangan besar minyak yang belum dioperasikan di Afrika dan juga adanya negara China yang terlebih dulu berkerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal minyak ini membuat Amerika sangat berkepentingan untuk menguasai daerah ini yang memiliki sumber kekayaan alam tanpa ada saingan Arab dan Islam, begitu juga untuk menghadapi kehadiran China di Afrika yang mana negara tersebut telah disebut – sebut sebagai saingan terbesar Amerika dalam hal perekonomian saat ini